

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diawali dengan sejarah hukum laut internasional pada zaman Romawi kuno, penguasaan laut belum menimbulkan perlintasan laut, karena kekuatan Romawi sebagai kekuasaan kekaisaran masih menguasai Laut tengah dan belum ada kerajaan- kerajaan yang mengimbangi kekuatan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pada masa abad pertengahan imperium Romawi runtuh, timbul negara-negara yang menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya, antara lain Venetia mengklaim Laut Adriatik, Genoa mengklaim laut Liguria dan Pisa mengklaim laut Thyrrhenia¹. Negara-negara ini menimbulkan keadaan yang menyebabkan laut tidak menjadi milik bersama lagi, sehingga diperlukan peraturan-peraturan atas laut menurut hukum.

Peraturan tentang wilayah laut yang paling penting pada saat ini adalah *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Perjalanan UNCLOS 1982 yang berada dibawah PBB cukup panjang. Dimulai pada Konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut I Tahun

¹ Mochtar Kusumaatmaja, 1983, *Hukum Laut Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 5.

1958.² Pada konferensi Hukum Laut Internasional yang pertama telah disepakati dalam 4 konvensi berikut:

1. Konvensi tentang *High Seas*
2. Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan
3. Konvensi tentang Landasan Kontinen
4. Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Laut Bebas

Pada tahun 1960 digelar konferensi Hukum Laut Internasional II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil yang telah dicapai pada konferensi Hukum Laut Internasional I, tetapi tidak menghasilkan perjanjian apapun. Pada Konferensi Hukum Laut III yang dimulai pada Tahun 1972 sampai dengan 1982 membahas isu-isu sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konferensi ini. Hasil UNCLOS 1982 adalah permasalahan *maritime zones*, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut bebas, wilayah *sea-bed* internasional dan perairan kepulauan.³ UNCLOS 1982 mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di seluruh dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS 1982 ini berlaku pada tahun 1994 setahun setelah Guyana menjadi Negara ke-60 untuk meratifikasi

² ibid

³ <http://www.sangkoeno.com/2016/07/sejarah-lahirnya-unclos.html>, diakses 22 Agustus 2018

perjanjian ini. Untuk saat ini telah ada 158 negara yang sudah meratifikasi perjanjian ini.⁴

Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan.

Negara-negara menghendaki kekuasaan atas laut yang berbatasan dengan pantainya bersumber pada keinginan untuk mengamankan kepentingan

⁴ https://www.academia.edu/12010644/Sejarah_Lahirnya_Hukum_Laut_Internasional, diakses 22 Agustus 2018

negara dan rakyatnya masing-masing. Perikanan, keamanan dan pertahanan, kesehatan umum, pencegahan penyeludupan, dan lain-lain kepentingan yang dianggap merupakan kepentingan masyarakat dan negara hendak dilindungi dengan klaim kekuasaan negara pantai atas laut.⁵

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan transportasi keseluruhan pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat internasional dan subjek- subjek hukum internasional lainnya yang memiliki kepentingan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam hal pelayaran, perdagangan, sampai penelitian ilmu pengetahuan.⁶

Laut masih merupakan salah satu jalur transportasi yang masih diminati untuk pengiriman barang. Banyak pengiriman yang dilakukan seperti transportasi kapal yang membawa setiap kebutuhan negara melalui laut dan melewati jalur perairan internasional. Oleh karena itu, keamanan adalah masalah yang paling utama. Kepentingan akan keamanan di tengah-tengah lautan ini berhubungan dengan sifat lautan selaku tempat yang pada pokoknya tidak turut wilayah suatu negara tertentu atau dengan perkataan lain, menjadi wilayah bersama dari semua negara di dunia ini⁷. Banyak pihak yang akan merugi jika keamanan di perairan internasional tidak terjamin. Laut dapat dikatakan aman apabila laut tersebut bebas dari segala ancaman kekerasan,

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁶ R. Wirjono Prodjodikoso, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 31.

⁷*ibid.*

ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat mengganggu dan membahayakan kapal-kapal yang berada di laut.

Pada kenyataannya wilayah perairan laut masih terjadi kejahatan maritim seperti pembajakan kapal, terorisme, dan kekerasan. Pembajakan kapal di laut lepas baik yang dilakukan oleh kapal kapal asing maupun oleh kapal kapal domestik di wilayah perairan internasional di akhir akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayar. Pembajakan kapal adalah salah satu kejahatan maritim. Istilah pembajakan kapal atau "*piracy*" memiliki pengertian yang beraneka ragam, baik pengertian yang sifatnya akademis atau praktis maupun definisi yang telah menjadi pedoman yuridis dan telah disepakati oleh Negara-negara berdaulat di dunia internasional.

Berdasarkan UNCLOS PBB 1982 dalam Pasal 101 pengertian pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantara tindakan berikut:

- a) "setiap tindakan keras atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan oleh tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara demikian ;
 - i. di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
 - ii. terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun.
- b) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuat suatu kapal atau pesawat udara pembajak.

- c) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b)⁸”

Selanjutnya pada Pasal 102 diatur bahwa:

“ tindakan-tindakan perompakan kapal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101, yang dilakukan oleh suatu kapal perang, kapal, atau pesawat udara pemerintahan yang awak kapalnya telah berontak dan telah mengambil alih pengendalian atas kapal atau pesawat udara itu disamakan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu kapal atau pesawat udara perompak ”⁹

Kapal perompak adalah suatu kapal yang dikuasai oleh orang-orang yang menggunakannya untuk tujuan melakukan salah satu tindakan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 101 di atas. Hal ini berlaku juga atas kapal yang digunakan untuk tindakan perompakan tersebut, sepanjang kapal itu masih dikendalikan atau dikuasai oleh orang-orang yang diputuskan bersalah karena tindakan perompakan kapal.

Di laut bebas atau di suatu wilayah perairan yang berada di luar yurisdiksi suatu negara tertentu, setiap negara dapat menahan sebuah kapal perompak atau kapal yang diambil dan atau dikuasai oleh para perompak dan menahan orang-orang yang terlibat sekaligus menyita barang-barang yang ada di atas kapal. Kalau pembajakan laut dilakukan dalam laut wilayah suatu negara tertentu, maka tidak ada keragu-raguan bahwa pengadilan dari negara itulah yang memeriksa perkaranya dan menjatuhkan hukuman pidana pada bajak

⁸ UNCLOS 1982 Pasal 101 diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

⁹ UNCLOS Tahun 1982 Pasal 102 terjemahan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

laut itu dengan mempergunakan Pasal-Pasal hukum pidana yang bersangkutan dari negara itu.¹⁰

Secara teoritik, negara dipandang memiliki wewenang untuk mengatur benda-benda atau peristiwa-peristiwa (hukum) yang terjadi di dalam wilayahnya¹¹. Konsep yurisdiksi pun kemudian lahir dari adanya kedaulatan suatu negara. Berdasarkan hukum internasional terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang menjadi dasar penerapan yurisdiksi suatu negara terhadap pembajakan di laut, yakni, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi nasionalitas yang terdiri dari nasionalitas aktif dan (personalitas) pasif, yurisdiksi perlindungan, yurisdiksi universal dan yurisdiksi ekstra teritorial.¹²

Pihak yang berhak melakukan penahanan atas dasar dugaan perompakan kapal adalah kapal perang atau kapal militer dan atau kapal yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Namun apabila penahanan dari negara tertentu berdasarkan suatu kecurigaan yang tidak memiliki dasar yang kuat, maka negara penahan tersebut wajib bertanggung jawab atas kesalahan penahanan dengan membayar ganti rugi kepada negara dimana bendera kapal digunakan atas kerugian atau kerusakan yang diderita.¹³

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹¹ Huala Adolf, 2000, *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, Raja Grafindo Persada. Cetakan III, Jakarta, hlm. 111.

¹² 8 I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum laut Indonesia*, yrama Widya, Bandung, hlm.185.

¹³ <http://kanalhukum.id/kanalis/konflik-hukum-dalam-penegakan-hukum-atas-kejahatan-perompakan-kapal-di-laut/12>, diakses 22 Agustus 2018

UNCLOS 1982 sendiri secara garis besarnya banyak memuat ketentuan-ketentuan yang tidak pasti. Memang ada ketentuan-ketentuan yang secara jelas merinci hak dan kewajiban negara-negara, akan tetapi lebih banyak lagi ketentuan-ketentuan yang hanya meletakkan pedoman-pedoman dasar. Kewenangan dan tanggung jawab negara atau organisasi internasional ditetapkan berdasarkan pelaksanaan dari pedoman-pedoman tersebut, sehingga pada akhirnya ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan dalam praktek akan muncul dalam bentuk pelaksanaan berdasarkan pedoman-pedoman tersebut.¹⁴

Pembajakan di laut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum internasional karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Meskipun sudah dibuat berbagai macam aturan guna memberantas kejahatan di laut, namun kasus-kasus pembajakan terus saja bermunculan dan potensi dimasa depan akan selalu ada salah satu kasus adalah pembajakan kapal-kapal Indonesia di Filipina.

Kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap kapal Brahma 12 dan Kapal tongkong Anand 12 yang membawa sepuluh orang awak kapal yang berkewarganegaran Indonesia. Pembajakan ini dilakukan pada saat kapal pembawa batu bara tersebut berangkat dari sungai putting menuju ke Filipina selatan pada tanggal 15 maret 2016 dan pada saat

¹⁴ A.W.Koers, dimuat dalam Etty R.Agoes, 1991, Konvensi Hukum Laut 1982, Abardin,cv, bandung, hlm. 4.

melewati pulau basilan yang dimana terdapat pulau pulau kecil dan jarang dilewati oleh kapal kapal patroli dan di kejar oleh beberapa kapal cepat. Para pembajak itu lalu menyandra dua kapal itu beserta awak kapal dengan senjata api. Mereka lalu menghubungi pemilik kapal dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso (setara dengan 14.2 miliar rupiah). Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, melalui Kementrian luar negri segala upaya akan dilakukan demi membebaskan awak kapal yang berwarganegara Indonesia tersebut. Termasuk negoisasi untuk mengikutsertakan TNI dalam pembebasan warga Negara Indonesia tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2016, pihak militer Filipina meyakini operasi pembebasan sandera asal Indonesia yang kini ditawan oleh militant Abu Syaaf, masih bisa ditanganin sendiri. Dengan begitu, tawaran bantuan militer Indonesia sudah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus. Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. “ Berdasarkan Konstitusi, Negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus,” kata juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Brigadir Jendral Restituto Padilla. Pada tanggal 10 April 2016, 18 prajurit Filipina tewas dalam operasi pembebasan sandera di Pulau Jojo, Basilan. Mereka tiba tiba disergap saat dalam perjalanan menuju medan pertempuran.

Pada tanggal 29 April 2016, Militer Filipina mengerahkan pesawat tempur membombardir titik-titik diduga markas militan Abu Sayyaf di pedalaman Pulau Jolo, Provinsi Sulu. Salah satu sandera asal Malaysia, Wong Teck Chi, menghubungi orang tuanya lewat sambungan telepon tiga hari lalu.

Pada tanggal 1 Mei 2016, 10 ABK warga Negara Indonesia dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf di daerah Sulu pada minggu pada hari minggu siang hari dan ditemukan di depan rumah gubernur Sulu. Saat ditanyakan tentang uang tebusan salah satu korban mengatakan tidak tahu menahu tentang itu. Ia hanya mengetahui saat dibebaskan ia dan rekan rekannya disuruh mencari rumah gubernur sendiri. Presiden Jokowi memasitkan 10 WNI tengah malam tiba di Lanud Halim Perdanakusuma.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Pemerintah Indonesia dapat turut campur dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di perairan negara lain ?
2. Bagaimanakah kebijakan dan peran Pemerintah Indonesia yang dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia yang terjadi di perairan negara lain ?

¹⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html>, diakses 22 Agustus 2018

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Indonesia dapat turut campur dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di perairan negara lain.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan peran pemerintah Indonesia dalam menangani pembajakan kapal Indonesia di negara lain.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum khususnya bidang Hukum Internasional tentang kebijakan dan peran pemerintah dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di negara lain.
2. Bermanfaat bagi Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara.

E. Keasilian Penelitian

Sepengetahuan saya, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, apabila dikemudian hari ditemukan penelitian yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

- 1) Lucky Rezki Saputra, nomor mahasiswa H1 A1 12 232, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, menulis skripsi dengan judul “ Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kapal Asing di Perairan Teritorial Indonesia “. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan yurisdiksi teritorial Indonesia yang terjadi terhadap pembajakan kapal-kapal asing yang memiliki yurisdiksi sendiri berdasarkan bendera kapalnya di perairan teritorial Indonesia.

Dengan hasil penelitian adalah kejahatan terhadap kapal yang dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara merupakan kejahatan perompakan yang dilakukan oleh para bajak laut. Sehingga dalam batas-batas yurisdiksi ini akan berlaku yurisdiksi teritorial terhadap kejahatan yang dilakukan. Dimana penerapannya menggunakan hukum positif Indonesia terhadap kewenangan untuk menahan, memeriksa dan mengadili. Perompakan yang dilakukan terhadap kapal asing, hal ini tidak serta merta menjadikan kejahatan tersebut tidak dapat diproses dengan alasan terdapat kedaulatan negara lain dalam satu peristiwa. Tetapi karena berdasarkan pada prinsip yurisdiksi teritorial, maka telah menjadi kewenangan penuh bagi

pemerintah Indonesia untuk memproses kejahatan tersebut berdasarkan pada yurisdiksi teritorialnya. Bahwasannya selain melakukan perompakan, umumnya pelaku juga melakukan satu atau lebih tindak pidana lainnya, seperti penculikan/penyenderaan untuk meminta tebusan kepada pemilik kapal, atau melakukan penganiayaan terhadap awak kapal untuk memberi rasa takut kepada awak kapal sehingga pelaku dapat dengan bebas melakukan aksinya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari perbuatan mereka yang diperoleh dari hasil tebusan bagi sandera atau setoran bulanan yang mereka peroleh dari pemilik kapal yang diancam keselamatan kapal dan awaknya oleh perompak.

2) Asri Dwi Utami, nomor mahasiswa E 0008117, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, menulis skripsi dengan judul “ Analisis Yurisdiksi Perompakan Kapal Laut di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perompakan Kapal Sinar Kudus MV”. Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana aturan hukum internasional yang mengatur mengenai perompakan di laut lepas ?
- b. Bagaimana penerapan yurisdiksi dalam kasus perompakan kapal sinar kudus MV ditinjau dari aspek hukum internasional ?

Dengan hasil penelitian adalah

1) Aturan hukum internasional mengatur mengenai perompakan di laut lepas. Beberapa aturan hukum internasional yang mengatur perompakan yakni:

a) *Convention on the high seas* 1958 yakni Pasal 14-21 CHS.

b) *United Nation Convention on the Law of the Sea* yakni Pasal 100-107 dan Pasal 111.

c) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* 1988 yakni Pasal 3,6 dan 8.

d) Resolusi DK PBB yakni nomor 1816 tahun 2008, nomor 1838 tahun 2008, nomor 1851 tahun 2008, nomor 1976 tahun 2009.

e) *International Maritime Organization* yakni resolusi nomor 1025 (A.26) tentang *Code of Practice for the Investigation of Crime of Piracy and Armed Robbery Against ship*, Kode Etik Djibouti.

f) *International Maritime Bureau*.

g) Perjanjian regional terkait dengan perompakan yakni *European Security and Defence Policy, Regional*

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, UNODC Counter Piracy.

Aturan-aturan hukum ini dapat dijadikan landasan bagi setiap negara yang akan menerapkan yurisdiksinya terhadap kasus perompakan. Hal ini disebabkan karena perompakan merupakan *jus cogens*, sehingga aturan-aturan hukum nasional suatu negara dapat diberlakukan untuk mengadili para perompak.

2) Penerapan yurisdiksi dalam kasus perompakan kapal Sinar Kudus MV ditinjau dari aspek hukum internasional seperti:

a) Yurisdiksi Indonesia

Yurisdiksi Indonesia dapat diterapkan dengan menerapkan asas nasionalitas pasif dan yurisdiksi teritorial sebagai negara bendera kapal Sinar Kudus MV.

b) Yurisdiksi Somalia

Yurisdiksi Somalia dapat diterapkan dengan menerapkan asas nasionalitas aktif sebagai negara yang menjadi negara dari kewarganegaraan para perompak.

c) Yurisdiksi Regional

Yurisdiksi Regional dapat dilakukan oleh negara-negara yang menyatakan dirinya berkomitmen untuk memberantas perompakan dengan cara membuat pengadilan tribunal yang dapat mengadili perompak.

d) Yurisdiksi Universal

Perompakan merupakan *Ius Cogen* sehingga merupakan kejahatan internasional yang telah dinyatakan sebagai kejahatan yang harus diberantas secara bersama-sama. Oleh karena itu, setiap negara yang berkeinginan untuk melakukan pengadilan terhadap para perompak dapat menerapkan yurisdiksinya. Serta negara dapat membuat suatu pengadilan tribunal yang berkewenangan untuk mengadili para perompak.

- 3) Siti Aisyah, nomor mahasiswa 070113338, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, menulis skripsi dengan judul “Upaya Kenya Dalam Menanggulangi Perompakan Di Perairan Somalia Tahun 2008-2010”. Rumusan Masalahnya adalah bagaimana upaya pemerintah Kenya dalam mengatasi perompakan yang terjadi di perairan Somalia pada tahun 2008-2010 ?.

Dengan hasil penelitian adalah negara Somalia yang merupakan negara yang diselimuti konflik internal dan kemiskinan, tidak mampu mengatasi perompakan dan memberikan kewenangan kepada negara internasional menangani perompak Somalia yang telah meresahkan negara-negara yang melakukan perdagangan internasional di wilayah perairan Somalia. Oleh karena itu, melalui resolusi PBB no. 1851, Kenya dan negara internasional merespon permintaan Somalia untuk melakukan penangkapan dan mengadili perompak Somalia demi kepentingan nasional masing-masing. Dengan keluarnya resolusi PBB 1851 yang memberikan kewenangan kepada negara internasional dalam pemberantasan perompakan hingga ke wilayah Somalia telah memberikan pandangan bahwa suatu negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang tinggi dapat mengintervensi negara yang lemah dan gambarannya adalah Somalia, sedangkan negara Somalia sebagai negara yang gagal pemerintahannya telah memberikan sedikit kedaulatannya demi keamanan wilayahnya dan internasional secara luas. Kenya sebagai negara yang memiliki kekuatan mengadili perompak dengan menggunakan hukum Kenya, tidak mampu berbuat maksimal karena perompakan Somalia memiliki jaringan yang lebih luas hingga diluar wilayah Somalia, baik itu di Yaman, laut arab, Kenya dan sampai pada India, sehingga angkatan laut militer Kenya dan negara internasional tidak mampu melakukan pengejaran secara maksimal.

F. Batasan Konsep

1. Jurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Pada prinsipnya negara memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) yang berada di wilayah asing
2. Pembajakan kapal

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H pembajakan kapal yaitu merompak atau mencuri barang-barang secara besar-besaran bersama dengan lain-lain kawan secara paksaan, kalau perlu dengan melukai atau membunuh orang-orang yang mempunyai atau menjaga barang-barang itu. Bajak laut juga dianggap sebagai *jure gentium* karena pembajakan/perompakan ini merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional.

3. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. Pada umumnya laut merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, yang dimana sering terjadinya kejahatan di suatu wilayah laut negara pantai. Oleh sebab itu kewenangan negara pantai dapat menerapkan yurisdiksinya. Wilayah laut yang dikuasai negara pantai :
 - a. Perairan pedalaman
 - b. Laut teritorial
 - c. Jalur tambahan

- d. Zona ekonomi eksklusif
 - e. Landas kontinen
 - f. Alur kepulauan
4. Laut lepas, pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber data.

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan:
 - 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
 - 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

- 3) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi keperpustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- b. Wawancara dengan Bapak Tody Baskoro sebagai Kepala Seksi IV wilayah Malaysia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia).

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/domatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana izin penulisan hukum/skripsi:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan, menguraikan secara umum tentang Hukum Laut Internasional, hak dan kewajiban negara dalam melindungi WNI hingga pengaturan hukum laut tentang pembajakan kapal berdasarkan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dan juga yurisdiksi negara serta peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pembajakan kapal Indonesia di perairan negara lain dengan studi kasus pembajakan kapal Brahma 12 dan kapal Tongkang Anand 12 oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Bab III: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran berisi tentang pendapat penulis mengenai kesimpulan yang telah didapatkan